



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ferdy Trisanto Kurniawan, S.T., M.Si.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

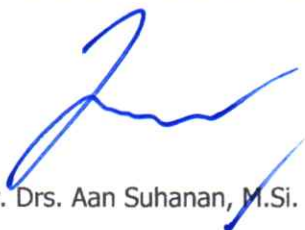
Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, November 2025

Pihak Kedua

Direktur Jenderal Perhubungan Darat


Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I
Jawa Barat


Ferdy Trisanto Kurniawan, S.T., M.Si.
NIP. 19780201 200312 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ferdy Trisanto Kurniawan, S.T., M.Si.

Jabatan : Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I Jawa Barat

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.

Jabatan : Direktur Jenderal Perhubungan Darat

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bandung, November 2025

Pihak Kedua

Direktur Jenderal Perhubungan Darat


Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.

Pihak Pertama

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas I
Jawa Barat


Ferdy Trisanto Kurniawan, S.T., M.Si
NIP. 19780201 200312 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS I JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1.	SK 1.1.1	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK 1.1.1.A	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan	Trayek	6
2.	SK 1.2.1	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK 1.2.1.B	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Lintasan	2
3.	SK 2.1	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 2.1.1	Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Paket	1
			IKK 2.1.2	Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM	Lokasi	10
			IKK 2.1.3	Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	1
			IKK 2.1.4	Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM	Lokasi	6
			IKK 2.1.5	Jumlah Monitoring dan Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ	Kegiatan	7

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
UNIT KERJA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS I JAWA BARAT
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

NO.	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
1.	SK 1.1.1	Meningkatnya konektivitas jaringan transportasi DTPK	IKK 1.1.1.A	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan Jalan	Trayek	6
2.	SK 1.2.1	Meningkatnya rasio konektivitas jaringan transportasi angkutan penyeberangan	IKK 1.2.1.B	Jumlah Layanan Subsidi transportasi Angkutan ASDP	Lintasan	2
3.	SK 2.1	Meningkatnya pelayanan publik sektor transportasi Jalan	IKK 2.1.1	Jumlah terminal tipe A yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Paket	1
			IKK 2.1.2	Jumlah operasional layanan terminal tipe A sesuai SPM	Lokasi	10
			IKK 2.1.3	Jumlah Fasilitas Penimbangan KB yang ditingkatkan pelayanannya untuk memenuhi SPM	Unit	1
			IKK 2.1.4	Jumlah operasional layanan Fasilitas Penimbangan KB sesuai SPM	Lokasi	6
			IKK 2.1.5	Jumlah Monitoring dan Evaluasi terkait Peningkatan Pelayanan Tugas Pokok dan Fungsi LLAJ	Kegiatan	7

NO.	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
4.	SK 2.2		IKK 2.2.4	Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Lokasi	5
5.	SK 3.1	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 3.1.1	Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	Kegiatan	3
			IKK 3.1.2	Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang	Kegiatan	4
			IKK 3.1.3	Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung	Unit	1
6.	SK 3.2	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi <i>active</i> dan <i>passive safety</i>	IKK 3.2.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Laporan	1
			IKK 3.2.2	Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi	Kegiatan	2
7.	SK 3.3	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 3.3.1	Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis	Kegiatan	23
			IKK 3.3.2	Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai	Lokasi	1

NO.	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
4.	SK 2.2		IKK 2.2.4	Operasional layanan Pelabuhan Sungai dan Danau sesuai SPM	Lokasi	5
5.	SK 3.1	Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penumpang dan Barang	IKK 3.1.1	Jumlah Kegiatan pengawasan operasional AKAP, AJAP, dan Pariwisata	Kegiatan	3
			IKK 3.1.2	Jumlah Kegiatan pengawasan operasional angkutan barang	Kegiatan	4
			IKK 3.1.3	Jumlah fasilitas penimbangan yang dibangun dan dioperasikan untuk mendukung	Unit	1
6.	SK 3.2	Meningkatnya kepatuhan kendaraan bermotor memenuhi <i>active</i> dan <i>passive safety</i>	IKK 3.2.1	Jumlah Kegiatan Pemeriksaan Fisik Rancang Bangun Kendaraan sesuai dengan pedoman	Laporan	1
			IKK 3.2.2	Jumlah Alat Uji yang telah dikalibrasi	Kegiatan	2
7.	SK 3.3	Menurunnya jumlah titik konflik lalu lintas jalan	IKK 3.3.1	Jumlah Perlengkapan jalan yang dibangun dan dioperasikan sesuai dengan spesifikasi teknis	Kegiatan	23
			IKK 3.3.2	Jumlah Lokasi LRK yang Dilakukan Intervensi Penanganan Sesuai	Lokasi	1

NO.	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
				Pedoman		
8.	SK 4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1
			IKK 4.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP)	Nilai	82,5
			IKK 4.3	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis	Presentase	95
			IKK 4.4	Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kemeterian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses)	%	60
			IKK 4.6	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE)	Nilai	80
			IKK 4.7	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	3
			IKK 4.8	Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor)	Kegiatan	16

NO.	SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		SATUAN	TARGET
(1)	(2)		(3)		(4)	(5)
				Pedoman		
8.	SK 4	Meningkatnya Indeks Reformasi Birokrasi Ditjen Perhubungan Darat	IKK 4.1	Kegiatan Perencanaan Pembangunan Ditjen Perhubungan Darat	Kegiatan	1
			IKK 4.2	Peningkatan Akuntabilitas Kinerja BPTD (Nilai SAKIP)	Nilai	82,5
			IKK 4.3	Peningkatan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Dit Teknis	Presentase	95
			IKK 4.4	Tindak Lanjut Rekomendasi Opini BPK (Skor) Kemeterian Perhubungan (tindak lanjut sampai tahap proses)	%	60
			IKK 4.6	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI yang diukur oleh Ditjen Perhubungan Darat (Nilai LKE)	Nilai	80
			IKK 4.7	Kegiatan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Kegiatan	3
			IKK 4.8	Kegiatan Terkait Sistem Merit SDM Ditjen Perhubungan Darat (Skor)	Kegiatan	16

Kegiatan**Anggaran**

1. Program Infrastruktur Konektivitas

a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	13.466.840.000
b. Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	72.027.124.000
c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	41.428.596.000
d. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	11.313.640.000

2. Program Dukungan Manajemen

a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	11.091.714.000
b. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp.	67.586.527.000

Disetujui,
Direktur Jenderal Perhubungan Darat


Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.
NIP. 19671031 202521 1 001

Bandung, November 2025
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas I Jawa Barat



Ferdy Trisanto Kurniawan, S.T., M.Si.
NIP. 19780201 200312 1 002

Kegiatan**Anggaran**

1. Program Infrastruktur Konektivitas

a. Infrastruktur Konektivitas Transportasi Darat	Rp.	13.466.840.000
b. Pelayanan Transportasi Darat	Rp.	72.027.124.000
c. Keselamatan dan Keamanan Transportasi Darat	Rp.	41.428.596.000
d. Penunjang Teknis Transportasi Darat	Rp.	11.313.640.000

2. Program Dukungan Manajemen

a. Pengelolaan Organisasi dan SDM Transportasi Darat	Rp.	11.091.714.000
b. Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum Transportasi Darat	Rp.	67.586.527.000

Disetujui,
Direktur Jenderal Perhubungan Darat



Dr. Drs. Aan Suhanan, M.Si.
NIP. 19671031 202521 1 001

Bandung, November 2025
Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat
Kelas I Jawa Barat



Ferdy Trisanto Kurniawan, S.T., M.Si.
NIP. 19780201 200312 1 002